

## DOXA ETIK KESENJANGAN PERSONALIA HABITUS MAHASISWA AKUNTANSI

Oleh

Yulis Diana Alfia<sup>1</sup>, Febrian Kwarto<sup>2</sup><sup>1,2</sup>Fakultas Ekonomi dan Bisnis

Universitas Mercu Buana Jakarta

yulis.diana@mercubuana.ac.id<sup>1</sup>, febrian\_kwarto@mercubuana.ac.id<sup>2</sup>Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi doxa kesenjangan personalia dalam habitus mahasiswa penempuh Mata Kuliah Etika Bisnis dan Profesi. Strukturalis Generatif Freirien digunakan sebagai basis eksplorasi metodologis dengan menggunakan metode *Freirien Coding Analysis*. Strukturalisme generatif Bourdieu merupakan *grand theory* yang bersifat generik yang merekonsiliasi dualism dalam pandangan keilmuan modern yang *single vision*. Perspektif sosiologi Bourdieu mempelajari hubungan struktur – agen dan mengakomodasi bagaimana sistem kekuasaan kapital berinteraksi dengan kemampuan agen untuk berdiam sekaligus melepaskan diri dari doxa habitus dalam *field*. Sehingga, pola Freirien merupakan pola pedagogis yang tepat dalam mengeksplorasi doxa dalam kerangka pendidikan dialogis, yang tujuan utamanya adalah untuk memahami dan selanjutnya membebaskan habitus dari doxa sistem kuasa kapital yang disharmoni. Berdasarkan *Freirien Coding Analysis*, ditemukan dua doxa etik habitus, yaitu *The beauty of capital domination* dan *the power of knowledge reification*. Dua aspek kesadaran (doxa) yang dimiliki habitus ini memiliki potensi yang dapat mendorong terjadinya kesenjangan (personalia). Melalui pemahaman ini, diharapkan pendidik dapat menemukan point kritis yang diperlukan untuk melakukan perubahan, dimana perubahan pada hal dasar sangat diperlukan. Pendidikan akuntansi sudah seharusnya memiliki peran yang mengorientasikan proses edukasi pedagogis pada terjadinya perubahan (*agent of change*) dan kemaslahatan sosial. Proses pendidikan harus berorientasi pada kepentingan sosial dan berorientasi pada *longlife education*.

**Kata Kunci:** etika, kesenjangan, strukturalis generatif freirien, *capital domination*, *knowledge reification*

Abstract

*The aim of this study is to explore the doxa of personnel assymetry of students habitus on subject of Etika Bisnis dan Profesi. Structuralism Generative Freirien is used as an methodological exploration basis, the method is Freirien Coding Analysis. Structuralism Generative of Bourdieu is a grand theory, reconcile the dualism of modern science perspective, single vision. The Bourdieu sociology perspective studies the relationship of structure – agent which accommodate how capital power system interacts with agent to be dominated or release themselves from the doxa of habitus in the field. So, Freirien model is an appropriate pedagogical pola for doxa exploration in the dialogical education frame. By with this education model we need to answer the main purpose, comprehend and to release the habitus from the disharmony doxa. Based on Freirien Coding Analysis, we found two ethical doxas, are the beauty of capital domination and the power of knowledge reification. These consciousnesses have potentiality to push the personnel assymetry occuration. Through this comprehension, educators could find the critical point to make alteration (as an agent of change). Accounting education must have function to reorient the pedagogical education process for liberation and change individual interest to social change (benefit) and for longlife education.*

**Keyword:** ethics, assymetri, structuralism generative freirien, *capital domination*, *knowledge reification*

## 1. PENDAHULUAN

Skandal korporasi terbesar yang terkuak pada 2002, Enron, melibatkan Arthur Anderson dari jajaran Kantor Akuntan Publik (KAP) *Big Five* dengan kolaborasi kejahatan bersama para akuntan Enron, merupakan kasus etika paling gamblang yang dapat dijumpai. Skandal ini terkuak ketika Sherron Watkins, *Vice President* Enron mengingatkan Kenneth Lay, sang CEO bahwa Enron akan dikenal sebagai sukses bisnis masa lalu dengan manipulasi *accounting* yang canggih (Tuanakotta 2012). Melalui penggelembungan piutangannya, menyembunyikan kerugian, dan kewajibannya, Enron mampu mendongkrak harga saham mereka dalam pasar bursa (Tonge *et al.* 2003). Pada November 2001, Enron diharuskan merevisi Laporan Keuangannya untuk lima tahun sebelumnya, dan hasilnya tidak menunjukkan keuntungan besar, bahkan sebaliknya Enron merugi \$586 juta. Arthur Anderson sebagai KAP pemegang perikatan audit Enron mengakui telah menghancurkan dokumen Enron dalam upayanya menghalangi proses hukum Enron. Irianto (2003) dalam penelitiannya menemukan bahwa manipulasi pembukuan, penggelapan pajak, penipuan sekuritas, dan *insider trading* merupakan pemicu terjadinya skandal korporasi, dan pemicu terbesar terjadi karena kasus manipulasi keuangan. Menanggapi banyaknya kasus tersebut, Tuanakotta (2012) menyatakan bahwa perlunya perubahan paradigma dalam profesi ini.

Persoalan etika yang mencoreng nama besar profesi akuntan itu, ternyata tidak hanya merugikan publik para pemegang saham Enron dan berimbas pada terjadinya krisis global, namun juga sampai pada ratusan pekerja rendahan yang harus mengalami PHK (Putus Hubungan Kerja). Tidak hanya Enron, terdapat banyak kasus etika dan skandal korporasi besar dimana akuntan memiliki andil besar dalam skandal korporasi tersebut, seperti WorldCom, Cisco System, Lucent Tech, Lehman Brothers dan lainnya dalam dekade terakhir ini (Stiglitz 2006). Bahkan Tuanakotta (2012) menyatakan "tidak ada yang baru di kolong langit ini", bahwa kejahatan akuntansi telah dilakukan

secara berulang-ulang pada lebih dari seabad. Berkaitan dengan keberadaan ini, maka tentunya persoalan etika dan kejahatan akuntansi merupakan persoalan yang memerlukan pemecahan mendasar dan signifikan.

Kejahatan akuntansi ini, tentunya tidak lepas dari (kegagalan) peran pendidikan akuntansi. Tidaklah berlebihan kiranya, karena pada dasarnya pendidikan merupakan media dalam melakukan transfer pengetahuan dan perilaku sebagaimana dengan nilai-nilai sosial masyarakat (Mulawarman 2008; lihat pula Dillard 1997; Hines 1988; dan Morgan 1988 yang mendiskusikan hubungan realitas dengan akuntansi). Pendidikan akuntansi dalam 1 (satu) abad ke belakang hanya melakukan pelayanan pada diskursus pasar (Freire 2000; Merino 2006; Triyuwono 2015) dan hanya untuk memenuhi segala asumsi kepentingan ekonomi (Armenic dan Creig 2004). Pendidikan akuntansi merupakan pabrikasi teknikal standar yang menyediakan para mahasiswa (sebagai pekerja) untuk memenuhi kebutuhan dan kepentingan korporasi melalui kepanjangan tangan kurikulum dan kekuasaan, Mulawarman (2008) menyebutnya sebagai hegemoni korporat. Merino (2006) menyatakan bahwa diskursus pasar dalam pendidikan akuntansi hanya akan meninggalkan isu moral etik. Pendapat-pendapat ini pada sisi lain berbeda dengan Dosch dan Wambsganss (2006) yang menyatakan bahwa lingkungan bisnis dan praktik manajemen sebagai penyebab utama terjadinya kegagalan etis dan *corporate malfeasance*, bukan pendidikan akuntansi.

Molisa (2014) bahkan menyatakannya sebagai kegagalan moral terbesar para akademisi akuntansi, tidak hanya karena tanggung jawab intelektualnya, namun karena akuntansi merupakan jantung bagi kunci kemudi terjadinya krisis ekologi dan sosial yang terjadi pada era modern. Molisa (2014) merangkum beberapa catatan kritis sebagai berikut:

*“Critical scholars have powerfully demonstrated, however, that accounting, far from being merely a technical practice, is in fact a social and transformative practice that is deeply implicated in perpetuating many of the social inequalities and ecologically destructive activities that have emerged historically and that we are living through today. Critical research has shown that, normatively, accounting reflects and reinforces, the values of systems of domination (see, for instance, Hines, 1992; Cooper, 1992; Arrington, 1993); ideologically, it has the function of aiding in the construction of a dominant class hegemony by homogenizing, naturalizing, and universalizing social practices in a way that masks unequal social relations (Cooper, 1980, p. 164; see also, Neu and Taylor, 1996); and materially, in terms of its distributive function, it reflects these unequal relations by “appraising the terms of exchange between social constituencies (and by) arbitrating, evaluating and adjudicating social choices” (Tinker, 1985, p. 81).”*

Sebelumnya Mulawarman (2008) dan Mulawarman dan Ludigdo (2010) menyatakan bahwa kejadian ini menunjukkan adanya citra ambigu pendidikan akuntansi, sehingga perlu dilakukannya reformasi pendidikan akuntansi yang beretika. Sudah seharusnya pendidikan menyiapkan anak didiknya untuk memiliki budi pekerti dan berbudaya tinggi, yang bukan hanya berorientasi keahlian dan kompetensi. Merino (2006) menyatakan hal ini sebagai ironi pendidikan akuntansi. Kamayanti *et al.* (2011) menyatakan bahwa tujuan pendidikan seharusnya melakukan transformasi budaya, memanusiasikan, menyiapkan seseorang untuk kehidupan eskatologisnya, dan untuk memerdekakan.

Matakuliah Etika Bisnis dan Profesi (Etbis) merupakan mata kuliah wajib tempuh bagi mahasiswa Strata Satu (S1) Akuntansi. Apa pentingnya mata kuliah ini bagi proses pembelajaran pengetahuan dan keilmuan akuntansi? Pertanyaan ini merupakan aspek penting yang perlu diurai dalam proses pendidikan akuntansi (lihat Bonawitz 2002). Kenapa? Akuntan pendidik perlu memahami pentingnya dan bagaimana seharusnya proses

pembelajaran akuntansi utamanya berkaitan dengan subjek Etbis harus dilakukan. Akuntan pendidik perlu memahami bagaimana metode dan dinamisasi kelas-kelas akuntansi perlu dikelola dan dihidupkan karena tujuan dari subjek ini tidak hanya mengenalkan mahasiswa tentang apa itu etika, namun bagaimana kita sebagai akuntan dan calon akuntan mampu membalik aspek perilaku tidak etis menjadi etis. Pembalikan ini merupakan aspek pentingnya, sebuah transformasi yang perlu dan penting dalam menghadapi perilaku tidak etis pada kalangan akuntan (Sari 2012).

Melalui penelusurannya tentang sejarah pendidikan akuntansi di Amerika Serikat, Chu dan Man (2012) menyatakan akan perlunya perubahan dalam pendidikan dan kurikulum akuntansi bahkan dalam satu abad terakhir ini. Dalam konteks Indonesia, Kamayanti dan Mulawarman (2009) menyatakan bahwa proses pendidikan di Indonesia masih berbasis *textbook* dan mengadopsi sistem pendidikan barat, dimana literatur pendidikan akuntansi 100% mengacu pada Amerika Serikat. Nelson (1995) bahkan menyebutkan bahwa akreditasi kampus mensyaratkan kurikulum yang seragam. Melakukan eksplorasi reformasi pendidikan di Amerika Serikat akan mengarahkan konklusi pada diikutinya oleh banyak negara-negara yang menjadi bagian dominasinya (hegemoni). Pendidikan akuntansi hingga akhir abad 20 dan berlanjut hingga sekarang ini, nyatanya masih hanya berkuat pada aspek-aspek teknikal akuntansi yang tujuannya adalah mereproduksi calon-calon CPA (*Certified Public Accountant*) (Van Wyhe 1994; Nelson 1995; Previts dan Merino 1998; Siegel *et al.* 2010), dimana disebutkan bahwa ujian CPA merupakan ukuran keberhasilan (Merino 2006; Dosch dan Wambsganss 2006). Hal ini sebagaimana dinyatakan Kamayanti dan Mulawarman (2009) bahwa perubahan seringkali sulit dilakukan dan hambatan terbesarnya adalah masalah pembelajaran dan kurikulum (lihat pula Nelson 1995 dan Ainsworth 2001).

Chu dan Man (2012) mentabulasi perubahan-perubahan dalam pendidikan

akuntansi yang lahir sebagai kesadaran akan pentingnya mereformasi pendidikan akuntansi menjadi lebih kaya dan beretika. Mulawarman dan Ludigdo (2010) menyatakan perubahan ini masih berkuat pada *reproductive view of learning* dan belum mengarah pada *constructive view of learning*. Kesadaran itu telah dimulai dengan Bedford Report 1986, dimana *The American Accounting Association's (AAA) Bedford Committee* menyatakan bahwa pendidikan akuntansi harus menekankan pada konsep dari pada sekedar aspek teknis dan bervisi *Lifelong education*. Perubahan kedua adalah *Big 8 White Paper* 1989, yang mulai menekankan akan kemampuan akuntan berinteraksi pada keberagaman budaya dan mampu melakukan *value judgement*. Selanjutnya merupakan katalisasi akan perubahan 1989 yang dilakukan oleh *Accounting Education Change Commission (AECC)*. Sebagaimana dikutip dari Sundem *et al.* (1990), pendidikan harus mampu menyiapkan akuntan akan kesiapan keahlian (*skill*), pengetahuan, dan perilaku, dimana orientasi profesi adalah pada nilai dan etika. Selanjutnya, puncak pergolakan reformasi pendidikan akuntansi adalah munculnya *The Sarbanes-Oxley Act of 2002* sebagai reaksi dari skandal akuntansi terburuk dalam 70 tahun terakhir. Mulawarman dan Ludigdo (2010) juga menyebutkan bahwa kesadaran etis juga dideteksi *The Wall Street Journal* dengan adanya peningkatan Mata Kuliah *Accounting Fraud* di berbagai perguruan tinggi di Amerika Serikat. Selain itu, *International Federation of Accountants (IFAC)* melalui *International Accounting Education Standard Boards* mengeluarkan standar pendidikan internasional beretika bagi akuntan profesional yang tujuannya adalah untuk mencapai *good practice*.

Masalah etika akuntan sebenarnya tidak hanya berkuat pada aspek individu dan organisasi saja, tetapi juga terletak pada level sistem, yaitu pada kerangka sistem ekonomi, sosial, dan lingkungan di mana individu dan organisasi beroperasi (Molisa 2014; Mulawarman dan Ludigdo 2010; lihat pula Freire 2000). Pernyataan ini tentunya memiliki dasar argumen yang jelas. Kita bisa melihat kembali pada kasus Enron yang menimbulkan dampak destruktif luas, misalnya masalah dirumahnya ratusan pegawai karena PHK.

*Self-interest* yang mendorong praktik manajemen laba pada laporan keuangannya tentu tidak pernah melihat bagaimana keadilan harus ditegakkan. Struktur "teknikal" pelaporan akuntansi pun menempatkan manusia sebagai sumber daya secara berstrata dengan keterwakilannya dalam akun "beban" yang diakhiri dengan perspektif metodis *matching concept*. Topik keadilan dan tenaga kerja (dalam konteks kesenjangan personalia) merupakan salah satu isu yang diangkat dalam subjek Mata Kuliah Etbis. Pada dasarnya topik ini merupakan topik yang menarik karena sebagaimana dibahas oleh Pikkety (2014) bahwa kesenjangan (*inequality*) merupakan feature utama dari kapitalisme. Sedangkan, subjek-subjek bahasan utama akuntansi tidak pernah menyentuh aspek etika berkaitan dengan masalah sumber daya manusia (tenaga kerja), padahal masalah tenaga kerja merupakan penopang utama dalam menjalankan bisnis – *silencing* (Bourdieu 1990). Aspek *costing* sebagai subjek yang membahas langsung mengenai pengelolaan tenaga kerja – dengan penempatannya pada akun-akun "*production cost*" atau *expense* lainnya, "upah" – hanya memainkan peran teknis dalam konstruksi matematis dengan dasar prinsip menekan biaya serendah-rendahnya untuk mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya (Lamberton 2014). Dalam sistem *doxa* kapitalisme (pendidikan) akuntansi tentunya hal ini akan dibenarkan, karena memang orientasi bisnis sebagaimana adanya adalah orientasi profit – seperti sifat/karakteristik paradigma yang membentuknya, materialisme, antroposentris profan yang meninggalkan denyut spiritualitas ketuhanan yang tersembunyi dalam balik kesadaran diri sebagai manusia – dehumanisasi (Lamberton 2014; Efferin 2015; Rospita dan Efferin 2017). Terjadinya proses dehumanisasi, salah satunya adalah karena proses dan paradigma pendidikan akuntansi selama ini berusaha untuk melepaskan aspek religiusitas dan spiritualitas yang sebenarnya ada dalam diri manusia. Hal ini

dapat kita konfirmasi dari iklim pendidikan modern yang materialis (Triyuwono 2010).

Masalah kesenjangan tentu salah satunya bersumber dari sistem stratifikasi sosial-ekonomi-politik (buruh – pemilik modal) sebagaimana telah banyak dibahas dalam teori-teori Marxisme, yang dalam akuntansi ditopang oleh yang namanya “*Agency Theory*”. Persoalan kapitalisme yang sistemik, membangun pola pikir dan kesadaran masyarakat dalam rentan panjang selama kekuasaannya dalam segala aspeknya. Masalah kesenjangan yang terjadi tentunya merupakan bagian dari persoalan etis yang ditimbulkan dari sistem hegemonik kapitalisme ini. Peng’akun’an tenaga kerja misalnya, dalam kategori *cost* dan berakhir sebagai *expense* yang hanya bertujuan untuk memuaskan kepentingan pemilik modal – kolonialis – merupakan pemahaman penting yang harus diserap oleh mahasiswa akuntansi. Dari sinilah terbentuk pula *doxa-doxa* etik (termasuk di dalamnya *un-ethical*) akuntansi yang harus dibenarkan secara mentah, mengingat pula sistem pendidikan hegemonik dan mainstream kita adalah *banking system* dan *textbook based* (Freire 2000). Sebagai *doxa* etik yang berdiam dalam habitus, keberadaan ini sulit untuk dapat dikenali, tidak disadari, bahkan secara ekstrim terkadang **diingkari**, bahwa tidak ada satu pun kesalahan dalam akuntansi dan proses pendidikan akuntansi yang berstrata menengah dalam sistem sosial masyarakat modern kita. Berdasarkan uraian di atas, maka tujuan dari penulisan artikel ini adalah untuk menelusuri *doxa* kesenjangan personalia habitus mahasiswa penempuh Mata Kuliah Etika Bisnis dan Profesi.

## 2. TINJAUAN PUSTAKA

### Diskursus Kritis: Sebuah *Point of View* Dekonstruksi

**Man... is the most imitative (mimetiko  
taton) of all animals  
and he learns his first lesson through  
mimicry (dia mimesos)  
Aristotle, Poetics  
(Bourdieu 1990)**

Stagnasi yang terjadi dalam pendidikan akuntansi bahkan dalam kurun lebih dari satu abad – mulai digagas dalam awal tahun 1900-an

(Merino 2006 dan Chu dan Man 2012), dalam satu sisi menuntut terjadinya perubahan untuk menyikapi segala macam problematika dalam profesi akuntansi, yang namun pada kenyataannya memiliki hambatan yang cukup sulit untuk dilakukan (Chu dan Man 2012; Kamayanti dan Mulawarman 2009). Pada sisi lain tentunya berkonsekuensi pada keberlanjutan keamanan sistem yang semakin mengakar dalam dunia pendidikan akuntansi. Molisa (2014) menganalisis bahwa keberlanjutan sistem ini dimapankan melalui hegemoni diskursus ilmiah dan teori-teori yang berperan sebagai penyanggah “ideologis” bagi sistem kekuasaan, seperti kapitalisme, *industrial civilization*, *white supremacy*, dan patriarki, yang ditopang dalam literatur-literatur pendidikan akuntansi kita hingga hari ini. Hal ini bisa menjadi hambatan yang menjebak gerak perubahan pada stagnasi yang mendorong pada keamanan sistem, *status quo* (Kamayanti dan Mulawarman 2009; Molisa 2014). *Status quo* dalam lingkup akademik dapat dilihat dari karakter penelitian-penelitian ilmiah yang berkembang secara *mainstream* hingga saat ini. Karakter generalistik, *only objectical view*, *quantification*, klaim bebas dari keraguan (eksak/pasti), netralitas, dan bebas nilai, merefleksikan karakter dari nilai-nilai sistem dominasi (*value of system of domination*), yang akan mendorong pada keamanan dan *status quo system*.

Sebagaimana dinyatakan Molisa (2014) di atas, stagnasi dan *status quo* terjadi karena sistem kekuasaan hegemonik – kapitalisme hingga neoliberalisme- yang menguasai – melalui perspektif kolonialisnya (lihat Freire 2000; Kamayanti *et al.* 2011) – hampir pada seluruh lini survival hidup masyarakat global, baik ekonomi, politik, sosial, budaya, teknologi, dan sebagainya yang diperkuat dalam sanggah ideologis pendidikan, termasuk akuntansi (Mulawarman 2006; Molisa 2014). Bagaimanapun, tidak mungkin untuk tidak dikatakan bahwa akuntansi hadir untuk melayani kepentingan kapitalisme, industrialisasi, dan perdagangan global. Sebagai aspek yang

bisa saja dikatakan “hanya” teknikal, dalam pelayanan kepentingan ini, ternyata akuntansi pada akhirnya hanya merupakan representasi bahasa sistem besar, yang konsekuensinya adalah memiliki sifat dan karakter sebagaimana sistem yang melahirkannya. Alfia (2015) menyatakan bahwa perkembangan akuntansi tidak mungkin terlepas dari jalan (*pathway*) kapitalisme modern, dimana pengakarannya sampai pada pembentukan cara pandang. Kemapanan pada hegemoni kuasa ini membawa pendidikan akuntansi berada pada *beauty cage* (Kamayanti 2011) atau *golden cage*. Kamayanti *et al.* (2011) dalam studinya melakukan eksplorasi tentang “*the beauty cage in accounting education*” mengekspresikan bahwa pendidikan akuntansi merefleksikan nilai-nilai praktik akuntansi. Dalam tesisnya dikatakan bahwa pelaporan keuangan merefleksikan realitas kepentingan, sebagaimana digaribawahinya dari Chwastiak dan Young (2003) bahwa laporan tahunan membungkam ketidakadilan. Pembungkaman sebagaimana praktik manajemen laba atau *window dressing* dalam *creative accounting* biasa dilakukan (lihat kembali pada banyaknya skandal korporasi melalui *make-up artist*, sang akuntan) merupakan upaya untuk mempercantik lembaran-lembaran laporan keuangan. Berdasarkan hasil eksplorasinya, praktik-praktik ini merupakan konsep “*beauty*” yang hadir dalam akuntansi dan membentuk pendidikan akuntansi, yang pada kenyataannya memiliki sifat-sifat maskulinitas, kolonisasi, dan relativitas – *the beast*. Ketiga aspek ini merupakan “*doxa*” – sangkar – yang membentuk bawah sadar pendidikan akuntansi – *the beauty*. Pendidikan akuntansi berada pada dominasi sistem besar yang juga menguasai hingga pada seluruh aspek kehidupan masyarakat modern, sehingga hampir melumpuhkan daya kritis intelektual serta pengaminan atas (kebenaran) keberadaannya. Sebagaimana ditulis Molisa (2014) sebagai berikut: “*A number of years ago Gray (1992, p. 401) suggested that academics can become unknowingly ‘placed in cages’, yet to date there has been little interest in how this might occur*” (cetak tebal oleh penulis).

Ketika dogma bisnis dan akuntansi yang diajarkan dalam pendidikan akuntansi adalah akumulasi profit, maka akan sama dengan mengorientasikan anak didik kita sebagai

manusia yang berorientasi akumulasi profit. Akan berbeda ketika bisnis dan akuntansi diorientasikan pada terciptanya keadilan dan kemaslaahan umat (sosial) maka dalam proses pendidikan kita juga akan mengorientasikan anak didik kita sebagai manusia yang berkeadilan sosial. Namun, hal ini berbeda dengan pendapat Dosch dan Wambsganss (2006) bahwa tidaklah mungkin pendidikan akuntansi mengajarkan cara-cara tidak etis – hal ini memang benar adanya – jika pun ada, pendidikan akuntansi melalui kurikulum seperti materi *fraud*, mungkin dapat menginspirasi mahasiswa untuk melakukan bagaimana tindakan-tindakan *unethical* dapat dilakukan. Namun tentunya sebagai pendidik, kita harus memberikan dan mengingatkan akan dilema etis yang mungkin terjadi. Dengan pendapat ini, Dosch dan Wambsganss (2006) tentunya belum memiliki *awareness* dalam melakukan eksplorasi tentang hal yang lebih prinsip dan mendasar tentang akuntansi dan keakuntansiannya (lihat kembali gagasan Dillard 1997; Hines 1988; dan Morgan 1988 yang menggagas tentang akuntansi dan realitas atau penelitian-penelitian lain dalam ranah *critical accounting*).

Alfia *et al.* (2015) menjelaskan bahwa terdapat hegemoni cara pandang modern yang bercirikan mekanistik dan fragmentatif, bervisi materialis dan sekularis yang menjadi basis cara pandang pengembangan revolusi industri – sebagai fundamen kapitalisme. Lebih lanjut dijelaskan bahwa pandangan ini telah menginfiltrasi peradaban modern melalui proses ekstensifikasi dan pervasif yang sedemikian rupa, sehingga *built-in* pada pola pikir, sistem, dan segala dimensi kehidupan (lihat pula Heriyanto 2003). Dapat dikatakan pandangan dunia ini telah menjadi sebuah kesadaran kolektif masyarakat modern, membentuk sebuah *frame of reference* baik dalam tatanan teoretis keilmuan atau pun praktik (Nasr 1989). Dijelaskan lebih lanjut bahwa dalam beberapa diskursus, pandangan ini merupakan cikal bakal terjadinya berbagai macam problematika peradaban modern (Nasr 1989; Capra 2004).

Keberadaan ini sebagaimana ditunjukkan Kamayanti et al. (2011); Molisa (2014); Gray (1992) sebagai *unknowingly cage, a beauty cage*.

Secara lebih menitik Bourdieu (1977) mengemukakan bahwa dalam *field* pendidikan (akuntansi) melahirkan *doxa* (sebagai bentuk reproduksi sosial) pada habitus – bawah sadar-individu dalam akademika (lihat pula Mulawarman 2010; 2011). *Doxa* merupakan bagian bawah sadar manusia sosial yang terbentuk salah satunya melalui pengetahuan (*knowledge*) yang dimilikinya. *Knowledge* dalam istilah Bourdieu, merupakan salah satu aspek modal - *capital*- yang diperoleh salah satunya melalui kooptasi *field-field* pendidikan, dalam usahanya untuk bersosialisasi dengan lingkungannya. Sebagaimana puisi Aristoteles yang dikutip oleh Bourdieu (1990) di atas, sebagai makhluk sosial manusia merupakan peniru yang terbaik dalam usahanya bertahan dan bersosialisasi dalam lingkungannya – sampai dengan pola pikir bawah sadarnya. Berdasarkan paparan ini, maka stagnasi dan *status quo* dimapankan pula oleh cara pandang dominan yang memengaruhinya melalui proses institusi pendidikan, sebagai sebuah sistem reproduksi sosial yang memantikkan nilai-nilai paradigmatis dalam sosial melalui segala macam produk pragmatik yang dihasilkannya, dinikmati, dan digunakan oleh masyarakat sosial secara masif. Di sinilah kiranya ngarai anonimitas kesadaran itu terjadi, sehingga keberadaannya akan selalu dijamin dan dibenarkan. Dengan melihat pada konteks Indonesia, kita dapat mempertanyakan kembali apakah pola dan konten pendidikan yang kita kenal selama ini adalah kepribadian kita? (lihat misalnya Kamayanti et al. 2011; Triyuwono 2010; Mulawarman dan Ludigdo 2010). Maka, di sinilah kita harus bisa membebaskan diri – *liberating*.

Sebagaimana Nasr (1989) dan Capra (2004) yang menyatakan cara pandang dalam kerangka industrialisasi itu menyebabkan terjadinya krisis ekologis dan sumber krisis sosial lainnya, Molisa (2014) mengidentifikasi pula, jika akuntansi ikut menyumbang pada terjadinya kesenjangan sosial (*social inequality*) dan degradasi ekologis (lihat pula Maunders dan Burritt 1991; Patrizi et al. 2018; Chwastiak dan Young 2003; Chwastiak 1998 dan 1999). Keberadaan ini tentunya

ditopang pula oleh *doxa* yang membangun bawah sadar akuntan dan calon akuntan melalui *field* akademik dan literatur-literturnya yang membungkam isu-isu krisis yang secara mendasar seharusnya relevan dan *legitimate* berkaitan dengan subjek akuntansi. Melihat keberadaan ini serta dinamika isu reformasi pendidikan akuntansi, yang salah satunya melalui peningkatan Mata Kuliah Ethis, tentunya menjadi tantangan tersendiri bagi para pendidik akuntansi untuk mengambil peran kritis (Kamayanti dan Mulawarman 2009). Bagaimana para pendidik akuntansi harus mampu menyikapi dan menciptakan dinamisasi kelas yang baik dan ikut mendorong pada terjadinya perubahan.

Sebagaimana argumentasi permasalahan yang dijabarkan di atas, bahwa permasalahan etika akuntan sebenarnya tidak hanya berkutat pada aspek individu dan organisasi saja, tetapi juga terletak pada level sistem, yaitu pada kerangka sistem ekonomi, sosial, dan lingkungan di mana individu dan organisasi beroperasi (Molisa 2014; Mulawarman dan Ludigdo 2010; lihat pula Freire 2000). Kita tidak dapat melihat akuntansi hanya sebagai aspek teknis penyajian informasi saja tanpa melihat aspek substansi nilai yang ada di dalamnya. Justru sebagaimana ungkapan Merino (2016) bahwa pendidikan akuntansi akan gagal mentransformasikan aspek etika ketika hanya berkutat pada aspek teknis saja. Berkaitan dengan isu keadilan dan tenaga kerja (kesenjangan personalia), secara teknis dapat kita baca dari diskursus permasalahan di atas, bahwa *capturing* teknis akuntansi telah gagal membaca aspek ketidakadilan dan kesenjangan personalia. Tenaga kerja sebagai aspek penyumbang dan sumber daya terbesar dalam menjalankan roda perekonomian direduksi oleh aspek teknis akuntansi dalam konsep *expense* yang berpegang pada prinsip ekonomi, menekan biaya serendah-rendahnya untuk mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya. Keberadaan ini pasti akan meninggalkan isu ketidakadilan yang ada di dalamnya (Chwastiak dan Young 2003 dan Molisa 2014).

Stratifikasi dan kesenjangan personalia dapat kita lihat pula dalam tatanan akun-akun yang membentuk aspek penggajian dan personalia, antara lain misalnya: gaji, upah, tunjangan-tunjangan, insentif, sampai dengan masalah kompensasi. Gaji merupakan bagian dari konsep *expense* yang berstrata dalam tingkatan struktur manajerial, upah adalah bagian dari konsep *manufacturing cost* sebagai sediaan perusahaan dan komoditi ekonomi, yang berarti bahwa penekanan biaya-biaya ini akan membawa *impact* pada pemaksimalan *profit* bagi perusahaan (Carter 2012; Hansen dan Mowen 2013). Selanjutnya muara konsep akhirnya adalah masalah kompensasi yang berada pada putaran laba, semakin tinggi tingkat laba maka semakin tinggi tingkat kompensasi, yang artinya adalah kembali pada dalil ekonomi pertama, yaitu menekan biaya-biaya. Di sinilah stratifikasi dan kesenjangan personalia terjadi. Ketika muatan teknis ini dipelajari dan diasup dengan intensitasnya pada mahasiswa, maka sama dengan mengorientasikan mahasiswa pada ketidakadilan itu sendiri.

Kehadiran subjek Etbis pada akhir 90-an (Mulawarman dan Ludigdo 2010) adalah untuk menghadapi stagnasi yang disertai dengan berbagai persoalan etika dalam praktik-praktik akuntansi. Subjek Etbis hadir sebagai mata kuliah yang bertujuan untuk mendorong terjadinya praktik akuntansi yang lebih baik dan beretika yang salah satu tujuan akhirnya tentu untuk dapat menciptakan equalitas sebagai anti tesis dari praktik yang tidak etis – yang tentunya harus berawal dari **proses kesadaran**. Tindakan tidak etis pasti akan menyebabkan ketidakadilan, *inequalitas*. Namun, Mulawarman dan Ludigdo (2010) dalam diskursusnya mengenai PEBI-IESQ (Pembelajaran Etika Bisnis dan Profesi Berbasis Integrasi *Intellectual-Emotional-Spiritual* Quotient) menjelaskan bahwa secara historis, ekonomi (neoliberal) tetap menunjukkan kinerja krisis yang ditopang pula oleh kejahatan akuntansi (korporasi), sementara pendidikan etika juga dijalankan. Tentunya keberadaan ini akan menimbulkan banyak pertanyaan, lantas bagaimana mata kuliah Etbis berperan dan dilakukan sementara transformasi etika tidak terjadi?

Dalam tesisnya, Alfia (2015) mengeksplorasi bahwa permasalahan transformasi (perubahan) yang diinginkan dalam beberapa dekade akhir ini – seperti munculnya isu akuntansi syariah yang disertai pula dengan terjadinya dinamika kritis di dalamnya – menghadapi permasalahan krusial berkaitan dengan cara pandang (filosofis) (lihat pula Triyuwono 2012). Hal ini dapat kita konfirmasikan pada penerapan standar akuntansi Syariah PSAK No. 59, yang secara mendasar masih menggunakan prinsip-prinsip standar akuntansi konvensional, dengan hanya melakukan perombakan di masalah akad yang sifatnya permukaan. Jika kita kembalikan kepada masalah prinsip, jelas penerapan akuntansi konvensional 100% berkiblat pada akuntansi barat yang kapitalistik (dari FASB ke IFRS). Hal ini jelas bertentangan dengan visi Islam yang rahmatan lil'alam. Tidak hanya masalah standar, penerapan perbankan sebagai basis implementasi standar juga banyak menjumpai permasalahan krusial, seperti antara bunga dan nisbah (bagi hasil); antara *profit loss sharing* dan *net revenue sharing* – yang berbasis *stock concept* (Rahmanti *et al.* 2013), dan sebagainya.

Tanpa perubahan mendasar berkaitan dengan cara pandang maka perubahan yang diharapkan akan terjatuh lagi pada persoalan-persoalan yang sama. Molisa (2014) juga menyatakan pendapat yang serupa, bahwa para akademisi sekarang ini harus menghadapi banyak persoalan krusial dan sebelum mencari alternatif pemecahannya, perlu untuk memiliki pemahaman yang jelas atas permasalahan yang ada. Berdasarkan diskursusnya Molisa (2014) menyatakan sebagai berikut:

*“In order to fulfil this obligation as “critic and conscience,” intellectuals need to be willing to critique not only particular people, organizations, and policies, but also the systems from which they emerge. In other words, intellectuals have to be willing to engage in radical critique. Generally, the term “radical” tends to suggest images of extremes, danger, violence, and people*



*eager to tear things down (Jensen, 2007, p. 29). Radical, however, has a more classical meaning. It comes from the Latin –radix, meaning “root.” Radical critique in this light means critique or analysis that gets to the root of the problem. Given that the patterns of social inequality and ecocidal destruction outlined above are not the product of a vacuum, but instead are the product of social systems, radical critique simply means forms of social...” (cetak tebal oleh penulis)*

Dalam pernyataan tersebut, bahwa dalam mencari solusi perlu dilakukan kritik radikal, menelusuri akar masalah “root” dengan bekal nurani – yang menurut Alfia (2015) *root* yang dimaksud tertuju pada masalah cara pandang (lihat pula Capra 2004 ketika berbicara pentingnya melakukan *shift paradigm*). Dalam diskursusnya dinyatakan bahwa segala macam problematika tidaklah lahir dari orang perorang, organisasi tertentu, atau kebijakan tertentu, namun berasal dari sistem dimana masalah dilahirkan (lihat pula Mulawarman dan Ludigdo 2010).

Berdasarkan *judgement* di atas, bahwa proses pembelajaran pendidikan akuntansi, dalam menjawab pertanyaan mendasar (akar), maka *doxa* adalah salah satu kemendasaran aspek yang perlu (bisa) kita cari tahu, yaitu apakah yang tertanam dalam diri bawah sadar (yang menjadi problematika) dan menjadi bagian yang membentuk cara pandang anak didik. Target dari pengeksplorasi *doxa*, pertama secara teknis untuk menciptakan proses pembelajaran dialogis yang menghilangkan ketergantungan pada *textbook*; kedua dalam konteks pembelajaran Etbis yang memiliki tujuan untuk melakukan transformasi perilaku etis dan berorientasi *longlife education*, maka akar dari perubahan perilaku adalah dimulai dalam diri para calon praktisi, maka mengeksplorasi *doxa* sebagai bagian dari representasi kesadaran anak didik adalah berkaitan dengan masalah akar; ketiga dalam proses dialogis ini diharapkan akan dapat menggugah kesadaran diri “nurani” individu sehingga bisa menjadi pijakan kritis untuk melakukan perubahan (pembalikan) atas *doxa*.

Pada dasarnya telah banyak penelitian yang menawarkan gagasan dan rekomendasi akan

perluinya melakukan perubahan dalam pendidikan akuntansi, dalam PEBI-IESQ misalnya, Mulawarman dan Ludigdo (2010) menggagas tentang integrasi pendidikan akuntansi melalui penyeimbangan daya intelektual, emosional, dan spiritual. Mulawarman (2007) sebelumnya menawarkan implementasi *Love-Based Accounting Education* (LBAE) melalui *Hyperview of Learning* (HOL), yang kemudian disempurnakan oleh Mulawarman dan Kamayanti (2009) melalui konsep rHOL (*Refined Hyperview of Learning*). Dalam ketiga studi tersebut, eksplorasi ide dalam melakukan perubahan dalam proses pendidikan akuntansi sampai pada bagaimana cara menginternalisasi nilai-nilai spiritualitas ketuhanan kepada anak didik. Hal ini memang penting untuk dilakukan mengingat bahwa salah satu problematika mendasar dari cara pandang modern adalah materialisme dan sekularisme. Masalah (kerusakan) nilai-nilai hanya akan dapat dilalui melalui kesadaran akan ketuhanan (spiritualitas) sebagai bentuk pengembalian diri kemanusiaan (humanisasi) manusia – anak didik – sebagai makhluk Tuhan dan bertuhan – *liberating*. Maka di sinilah puncak metodis yang dapat dilakukan dalam usahanya melakukan pembebasan anak didik dari proses pendidikan yang bersifat dehumanisasi. Mengeksplorasi *doxa* dalam penelitian ini merupakan lapisan dasar awal yang harus digugah dan merupakan fase awal penting. Jika dilihat dalam struktur rHOL, menggugah *doxa* dalam diri habitus berada pada proses *intuitive* dalam menggugah kesadaran kritis mahasiswa, sehingga pemahaman akan proses Etbis dimulai dari pengenalan dan penyadaran diri kritis individu dengan tetap inklusif.

Bertolak dari diskursus di atas, menggugah *doxa* tentang ke(tidak)adilan dan kesenjangan personalia merupakan hal yang penting. Sebagaimana diilustrasikan dalam kasus Enron di atas, *self interest* yang ditempatkan akuntansi dalam aspek-aspek teknikalnya membutuhkan mata keadilan terhadap para pekerja (rendahan) yang ter-PHK, Chwastiak dan Young (2003)

menyatakannya sebagai dehumanisasi pekerja, *the silent of inequalities* (Molisa 2014). Dengan demikian, pada kenyataannya akuntansi dan keprofesiannya memiliki dampak luas yang berperspektif moral etis (lihat Alfia 2016). Dan sudah menjadi tugas pendidikan akuntansi untuk dapat melakukan perubahan dalam setiap lini prosesnya, bahwa profesi akuntan tidak hanya sebagai profesi eksklusif yang hanya berpusat pada diri keprofesiannya, namun memiliki tugas dalam membawa kemaslahatan umat.

### 3. METODE PENELITIAN

Strukturalisme generatif freirean merupakan perpaduan pemikiran (metodologis) dari Bourdieu (1977; 1990) dan pandangan pedagogis Freire (2000). Strukturalisme generatif (SG) merupakan pandangan teori sosial Bourdieu (1977) tentang bagaimana proses reproduksi sosial terjadi. Mulawarman dan Ludigdo (2010) menjelaskan SG sebagai pertemuan antara teori dan praktik, sebagaimana dikutip dari Wacquant (2006), konsekuensi metodologis dari pandangan ini adalah keluasan peneliti dalam melakukan *mixing methods*. Sedangkan pandangan pendidikan pedagogis Freire yang bercorak dialogis mensyaratkan tatanan *praxis* yang terjadi dalam konteks tatanan *field* pendidikan akuntansi untuk membangun perubahan (*liberating*) dari sistem doxa sebagai hasil reproduksi sosial yang terjadi dalam habitus pendidikan akuntansi.

*Bourdieu's Theory of Practice* dapat diklasifikasikan sebagai *grand theory* yang bersifat generik dan dapat diaplikasikan dalam berbagai keadaan dan ranah penelitian yang berbeda. Bourdieu (1977 dan 1990) merupakan rekonsiliasi dualisme, struktur versus *agency*; *structuralism* versus *constructivism*; *determinism* versus *freedom*; atau makro versus mikro. Seperti penjelasan berikut, bahwa dalam perspektif strukturalisme, struktur berfungsi sebagai aturan yang membatasi pola pikir dan perilaku manusia, namun pada sisi lain, individu dapat (harus) mampu membuat perubahan sebagaimana perspektif voluntarisme yang menyatakan bahwa individu bebas dalam membuat pilihan-pilihan dan alternatif. Pola pemikiran sosial ini bertemu dengan konsep

pemikiran pendidikan pedagogis Freire (2000), *Pedagogis of The Oppressed*. Menurut Freire (2000) bahwa pusat persoalan manusia adalah masalah humanisme, menurutnya sejarah membuktikan bahwa tidak dapat dielakkan manusia akan berada pada titik memanusaiakan atau tidak memanusaiakan (*humanization* atau *dehumanization*). Namun, Freire menekankan bahwa *humanization* adalah dimana manusia sebenarnya harus berada. Untuk itu, maka proses pembebasan (*liberation*) merupakan aspek esensial dalam melakukan perubahan, karena bagaimana pun sistem sosial telah membawa dehumanisasi manusia sebagai proses reproduksi sosial yang tidak adil dan eksploitatif (lihat pula Alfia 2015; Heriyanto 2003; Capra 1997). Jadi terdapat sistem dominasi yang menguasai (*oppressor*) dimana struktur ini membatasi individu dalam memiliki pola pikir dan perilaku, yang menurut Freire (2000) proses *liberation* – melalui proses pendidikan pedagogis-harus dilakukan, karena individu memiliki kebebasan dan kemampuan untuk membuat pilihan dan perubahan (Bourdieu 1977; 1990). Dalam basis ide *Theory of Practice* Bourdieu adalah bertujuan untuk menjelaskan bagaimana rekonsiliasi permasalahan struktur – *agency* dapat diupayakan.

*Theory of Practice* Bourdieu – strukturalisme generatif – terdiri dari tiga elemen, yaitu *field*, *capital*, dan *habitus*. Bourdieu memahami bahwa *practice* merupakan hasil dari struktur sosial yang terjadi di dalam *field* (struktur makro), di mana aturan diberlakukan dalam habitus (*agency* mikro) melalui aspek *capital* yang dimilikinya, seperti yang termanifestasikan dalam *system of thinking*, perasaan, dan perilaku habitus. Hasil reproduksi dalam diri bawah sadar habitus ini disebut sebagai doxa. Proses ini berujung pada terjadinya *symbolic violence*. Freire (2000) menyatakan bahwa proses pendidikan, melalui dominasi birokrasi yang membentuk sistem kontrol dimana pendidikan adalah sub sistem dari sistem besar (*a sub-system of the system as a whole*) merupakan bentuk opresi dan *violence* melalui kepanjangan tangan kurikulum

(Mulawarman 2008). Dalam studi ini, merujuk pada Mulawarman dan Ludigdo (2010) bahwa pendidikan akuntansi merupakan *field* (berbasis *capital* yang dimilikinya) yang didalamnya terjadi proses reproduksi sosial (*doxa*) dalam diri habitus, melalui kurikulum dan sistem pembelajaran (sebagai bentuk *symbolic violence*). Untuk itu, Freire (2000) menawarkan model pedagogi dialogis dan beranjak dari model pendidikan *banking system* yang berfokus pada *textbook dependency*, sebagaimana selama ini diterapkan.

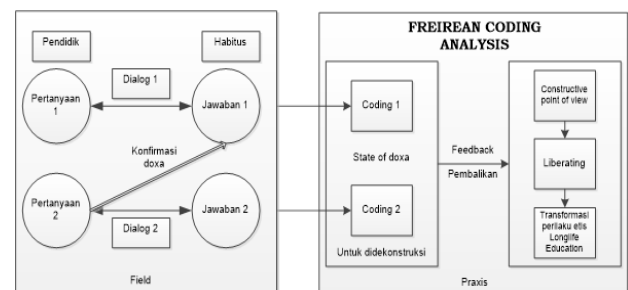
Melalui eksplorasi *doxa*, diharapkan terjadi dialog antara pendidik dan mahasiswa, studi ini bertujuan pula untuk menjawab beberapa hambatan atas perubahan yang diinginkan dalam pendidikan akuntansi, sebagaimana dinyatakan dalam studi Chu dan Man (2012). Dalam tabulasinya menyebutkan Nelson (1995) akan gambarnya tentang hambatan atas perubahan, salah satunya adalah *textbook dependency*. Pendidik akuntansi memiliki fokus yang berlebih pada teks, daripada fokus dan mengenali lebih dekat terhadap perkembangan anak didiknya melalui *dialogic education*. Teknik pengajaran yang lebih disukai adalah pada ranah “*how to*” dari pada dialektika “*why*”. Dalam perspektif pendidikan akuntansi yang masih hanya berkuat pada pengajaran aspek teknikal berkonsekuensi pada kurangnya dinamisasi dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan “*why*” yang berperspektif kritis dan mengarah pada *constructive learning*. Pendidik akuntansi lebih banyak menyukai – terjebak dalam – penjabaran-penjabaran “*how to*”, seperti bagaimana menjurnal, bagaimana melakukan *matching concept*, dan koridor-koridor “*bagaimana*” lainnya yang berciri teknikal dan berkarakter *anti-dialogic education* – pendidikan satu arah (Freire 2000) dalam belunggu *textbook dependency*. Bagi Nelson (1995) keberadaan ini menunjukkan kurangnya pendidik akuntansi dalam memahami dan menyelami proses pembelajaran dan aspek pedagogis dalam pendidikan akuntansi, sebagaimana dijelaskan Chu dan Man (2012) sebagai berikut:

*“Most educators are not adequately trained to teach in a non-technical manner. A PHD in accounting, has little or no formal training in how to teach in any manner. The*

*author observes that a kindergarten teacher have more formal training in learning processes and pedagogy than accounting professors”.*

Merino (2006) bahkan juga mempertanyakan bagaimana perubahan dalam pendidikan akuntansi akan dilakukan jika pengukuran prestasi mahasiswa hanya berdasar pada aspek *technical training*. Sehingga melalui pengeksploasian *doxa* ini diharapkan akan dapat menjawab persoalan *radic* yang diharapkan akan menjadi titik awal dalam melakukan transformasi perubahan etika melalui perubahan pandangan.

Berdasarkan tujuan dari penelitian ini, maka studi ini merupakan studi eksplorasi kritis tentang *doxa* yang membentuk cara pandang mahasiswa terhadap kesenjangan personalia melalui pendekatan dialogis inklusif *Freirean* dalam Mata Kuliah Etika Bisnis dan Profesi. Strukturalisme generatif freirean diturunkan ke dalam metode penelitian dalam Gambar 1. Dalam *Field* pendidikan akuntansi, proses dialogis antara pendidik dan habitus anak didik terjadi dalam rangka mengeksplorasi *doxa* sesuai dengan topik bahasan dalam kajian Etika Bisnis dan Profesi. Proses dialogis berkaitan dengan topik merupakan proses inklusif dalam memberikan pemahaman atas sebuah permasalahan. Dalam dialog 1 yang dinyatakan dalam pertanyaan 1 dengan ajuan pertanyaan “*mengapa*” atas fokus masalah kesenjangan personalia. Pertanyaan 2 diajukan untuk mengkonfirmasi jawaban yang diberikan dalam pertanyaan 1. Jawaban 2 merupakan justifikasi dan konfirmasi atas jawaban 1.



Gambar 1. Metode Penelitian

*Field* ini diturunkan ke dalam basis *praxis* untuk melakukan proses dialogis kritis lebih lanjut. Tahapannya adalah melakukan *coding* atas dialog (1 dan 2). Pewacanaan (akuntansi) kritis – utamanya dalam wacana Freire terkait isu maskulinitas dan kolonisasi yang melahirkan kesenjangan personalia – hasil *coding* ini akan mengarahkan pada proses pembalikan (*doxa*) melalui pembentukan konstruktif sebuah *point of view*. Tujuannya adalah untuk melakukan pembebasan (*liberating*) terhadap *doxa* yang bersifat maskulin dan kolonis melalui konstruksi kritis yang dilakukan dalam proses dialogis *praxis*-nya. Tujuan jangka panjangnya adalah kemampuan untuk melakukan transformasi perilaku etis melalui pembentukan *point of view* atas cara pandang yang bersifat lebih inklusif intuitif sehingga diharapkan dapat terjadi proses yang mendukung *longlife education*.

Proses pedagogis Freire dilakukan pada mata kuliah wajib Etika Bisnis dan Profesi (Etbis) di Jurusan Akuntansi yang diberikan kepada mahasiswa akuntansi semester 5 (lima) ke atas. Mata kuliah ini berbobot 2 (dua) SKS atau 100 menit dengan 14 kali tatap muka. Topik kesenjangan personalia secara spesifik membahas tentang isu keadilan dan tenaga kerja, merupakan salah satu topik yang akan dieksplorasi secara spesifik dalam studi ini. Studi ini dilakukan selama satu semester pada 1 (satu) kelas Etika Bisnis dan Profesi dengan jumlah mahasiswa sebanyak 37 mahasiswa. Rancangan mata kuliah dilakukan dengan metode dialogis, artinya dosen sebagai pendidik tidak berperan sebagai “*oppressor*” – sebagaimana disampaikan oleh Freire (2000) ketika mengutarakan kritiknya terhadap model pendidikan *banking system*. Dosen berperan sebagai pelempar bola – melalui ceramah dan pelontaran pertanyaan awal – serta berfungsi sebagai dinamisator diskusi kelas. Diskursus kritis dilakukan melalui diskusi kelas dengan terlebih dahulu, mahasiswa mendapat tugas untuk mengeksplorasi wacana terkait topik dengan membuat *resume* materi sebelum minggu tatap muka dilakukan, dengan eksplorasi kasus dan berfokus pada pencarian jawaban atas pertanyaan-pertanyaan “*why*”. Dialektika dalam satu semester merupakan proses yang berkesinambungan dari 14 kali

tatap muka, dengan tetap memperhatikan spesifik topik yang menjadi bahasan pada setiap kali tatap muka. Koleksi data tidak berpusat pada hasil pembelajaran pada saat ujian, tetapi berfokus pada dinamisasi diskursus yang dibahas dalam diskusi kelas. Melalui proses dialogis dinamis tersebut, peneliti yang terlibat sebagai pengampu diharapkan dapat lebih menangkap aspek *doxa* (kesadaran) habitus mahasiswa. Hasil diskursus kelas merupakan konten data yang akan dikumpulkan dan dianalisis melalui analisis data *Freirian Coding Analysis*.

#### 4. PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN Doxa dan Urgensi Pedagogis: Eksplorasi Dialogis.

Preamble dalam tulisan ini menggagas akan pentingnya subjek Etbis dalam proses pendidikan akuntansi, yang salah satu tujuan pentingnya adalah membalik perilaku tidak etis menjadi etis, terjadinya sebuah transformasi perilaku. Melalui eksplorasi *doxa* diharapkan secara intuitif akan dapat membalik kesadaran habitus melalui wacana kritis akan keberadaan *doxa* yang mengungkung diri habitus. Tujuan ini sebagaimana diwacanakan Kamayanti *et al.* (2011) dalam eksplorasinya tentang *the beauty cage of accounting education*, yang menjelaskan tujuan dari eksplorasinya adalah untuk melakukan penyadaran akan keberadaan perangkap pendidikan akuntansi yang bersifat maskulin dan kolonis, sehingga dapat menjadi jalan pemicu untuk keluar dan membebaskan (*liberating*) pendidikan akuntansi di Indonesia.

Melalui pengungkapan *doxa* paling tidak terdapat dua hal penting yang dapat dilakukan, pertama memiliki potensi untuk mengubah cara pandang melalui dialektika kritis dialogis dan inklusif dalam proses pendidikan akuntansi; kedua, membuat penyadaran dan pencegahan pada tindakan atau perilaku tidak etis. Wacana utamanya adalah melakukan upaya pembalikan *doxa* sehingga dalam jangka panjang diharapkan dapat merubah perilaku tidak adil menjadi berkeadilan, dan menempatkan keadilan

tenaga kerja (dalam konteks kesenjangan personalia) sebagai tanggung jawab sosial *inherent* yang harus diemban oleh seorang akuntan. Pendidikan akuntansi seharusnya memiliki peran yang mengorientasikan proses edukasi pada terjadinya perubahan dan kemaslahatan sosial serta tidak berorientasi kepentingan diri individual (baca: mencapai keamanan dunia kerja semata).

Urgensi pedagogis yang dapat dicapai dalam eksplorasi *doxa* ini akan memberikan kontribusi: pertama, perlunya menyediakan wacana kritis yang dapat menjadi bahan ajar bagi pendidik akuntansi terutama berkaitan dengan topik keadilan dan kesenjangan personalia dalam subjek Etika Bisnis dan Profesi; kedua, mendukung upaya reformasi dalam pendidikan akuntansi terutama berkaitan dengan isu etika; ketiga, memberikan wacana dan memperkaya eksplorasi metodologi pedagogis dalam pendidikan akuntansi sebagaimana penelitian-penelitian kritis terdahulu membangun pengembangan pendidikan melalui proses-proses penyadaran dan infiltrasi nilai-nilai yang meninggalkan ideologi kapitalistik dalam akuntansi; keempat, mendorong terjadinya transformasi nilai dalam mendukung praktik akuntansi yang bervisi moral etis dan bertujuan membangun keadilan dan kemaslahatan umat manusia – sebagaimana visi pendidikan seutuhnya, yang meninggalkan *self interest* sebagaimana doktrin dalam literatur akuntansi.

Dalam penelitian ini berkaitan dengan topik materi keadilan tenaga kerja, proses dialog dengan pengajuan pertanyaan utama kepada mahasiswa (**dialog 1**), yaitu mengapa jajaran eksekutif bergaji lebih tinggi (baca: tinggi) dibandingkan dengan karyawan rendahan (biasa)? Tujuan dari pertanyaan ini adalah untuk melihat perbedaan insentif yang diterima oleh masing-masing tingkatan pegawai. Dengan menggunakan bahasa yang berbeda-beda, namun secara umum mahasiswa menjawab jika hal ini wajar. Seperti salah satunya yang disampaikan oleh Daniar berikut ini:

“Karena jajaran eksekutif memiliki tanggung jawab yang lebih tinggi dan harus membuat keputusan-keputusan strategis penting bagi perusahaan, maka sangatlah

wajar jika mereka bergaji tinggi. Mereka para *top management* juga memiliki pengetahuan tertentu yang lebih jika dibandingkan dengan para karyawan (pekerja) biasa, misalnya dibandingkan dengan operator pabrik yang hanya mengerti bagaimana mengoperasikan mesin tertentu, atau seorang OB (*Office Boy*) yang hanya bertanggung jawab membersihkan ruangan kantor, karenanya jika mereka mendapatkan gaji yang jauh lebih tinggi, menurut kami hal ini adalah sudah seharusnya.”

Berdasarkan jawaban tersebut, terdapat dua *point* penting, yaitu: pertama adalah masalah tanggung jawab dan *scope* kerja dari masing-masing – dalam pernyataan mahasiswa di atas adalah keputusan strategis yang harus diambil oleh jajaran eksekutif dengan karyawan biasa. *Point* kedua adalah masalah tingkat pengetahuan yang dimiliki oleh masing-masing orang dalam struktur. Berikut ini, kita akan membuat dua kupasan sebagaimana *point* jawaban di atas.

. Kupasan pertama adalah perbedaan tanggung jawab dan *scope* kerja, peneliti mengajukan pertanyaan kepada kelas, “Apakah memang terjadi perbedaan tanggung jawab? Dalam hal ini, artinya apakah memang jajaran eksekutif memiliki tanggung jawab yang lebih besar. Diskusi kelas menyimpulkan:

“Jajaran eksekutif (*top management*) memiliki tanggung jawab terhadap pengambilan keputusan strategis yang dapat memengaruhi bagaimana aktivitas sebuah perusahaan harus berjalan, memberikan arahan penting yang berguna untuk mencapai tujuan perusahaan. Berdasarkan posisi tersebut, maka tingkat tanggung jawab yang dimilikinya lebih besar dibandingkan dengan karyawan biasa.”

Diskusi kelas berlangsung dengan bahasan tingkat tanggung jawab kerja dalam struktur. Jika ditinjau dari segi literatur, maka benar apa yang dilontarkan oleh hasil

diskusi kelas (baca misalnya: Simamora, 2004; Robbins dan Coulter, 2007; Hasibuan, 2010; dan Effendi 2016).

Kemudian dosen memberikan analogi tanggung jawab dengan proses dialogis yang mungkin, tanpa penarikan simpulan tertentu. "Apakah pernah terbayang jika petugas kebersihan kampus lalai tidak membersihkan toilet?" "Apa yang akan terjadi?" Kita tahu bahwa petugas kebersihan kampus merupakan salah satu unsur dalam civitas akademika, yang dalam kategori struktur kepegawaian merupakan karyawan yang berada pada tatanan struktur yang paling bawah. Abdurrahman menjawab:

"ya.. pastinya jika toilet tidak bersih dan kotor, ini akan sangat mengganggu aktivitas kampus. Meskipun toilet kadang dianggap sebagai salah satu ruangan yang sepele dibandingkan dengan ruangan lain, seperti ruang-ruang kelas, ruang dosen, TU, atau ruangan-ruangan lainnya, tapi toilet merupakan ruangan yang sangat penting. Bisa dibayangkan jika toilet tidak berfungsi dengan baik karena kelalaian salah satu pihak yang memang memiliki tanggung jawab atas kebersihan dan keberfungsian, pasti akan sangat mengganggu sekali, 109end jadi kampus akan terkena polusi udara karena bau yang tidak sedap, jika ada yang pingin buang air harus menahannya. pasti ini akan menimbulkan efek yang tidak menyenangkan, bayangin jika dosen yang terkena musibah, harusnya beliau ngajar jadi bubrah karena berhalangan hanya karena sakit perut dan toilet kampus tidak tersedia, ekstrimnya 109end menghentikan aktivitas belajar mengajar".

Dengan pernyataan kelas di atas, sekarang pertanyaannya adalah "apakah mereka memiliki tanggung jawab yang lebih kecil, jika dibandingkan dengan jajaran manajemen lain di atasnya?" Mari kita 109endi kasus ini pada *scope* yang lebih besar, kota misalnya, bayangkan jika sehari atau seminggu petugas kebersihan melalaikan tanggung jawabnya, tidak narik sampah atau tidak membersihkan selokan-selokan kota? Di kota besar seperti

Jakarta, dengan jumlah penduduk yang sangat padat, sampah merupakan problematika penting yang sangat memengaruhi dinamika kota. Banjir adalah persoalan yang 109endid setiap tahun dihadapi. Betapa sampah dan banjir akan menghambat aktivitas seluruh kota, berhentinya aktivitas kota berarti berhentinya program-program kota atau propinsi (gubernur). Bagaimana urgensi tanggung jawab masing-masing orang tanpa melihat jabatan akan sangat memengaruhi aktivitas secara keseluruhan.

Coba kita bandingkan dengan kelalaian atau ketidakmampuan seorang pimpinan dalam menjalankan tanggung jawabnya? Hal ini jelas juga akan merugikan banyak pihak sehingga tujuan 109endidi (perusahaan) juga tidak akan tercapai, aktivitas juga 109end *mandeg*. Jika dilihat dari sinergitas sebuah organisasi, maka pimpinan menentukan arah jalannya perusahaan, jajaran manajemen lain dan karyawan merupakan para pelaksana dari keputusan strategis yang dibuat oleh pimpinan puncak. Artinya bahwa suara dan perilaku bawahan harus sama dengan suara putusan manajemen puncak, jika tidak maka tujuan perusahaan sama-sama tidak akan tercapai. Dalam hal ini pada dasarnya antara pimpinan dan bawahan adalah satu tubuh, yang memiliki peran masing-masing dengan kapasitas tanggung jawab yang sama (tidak berbeda). Ibaratnya tubuh, maka jika salah satu bagian tubuh tidak berfungsi, maka akan mengganggu jalannya aktivitas tubuh lainnya dan keseluruhan (lihat misalnya Alfia 2015).

Kupasan kedua adalah perbedaan tingkat pengetahuan dan kemampuan yang berbeda. Seseorang dalam jajaran eksekutif tentunya memiliki perangkat pengetahuan yang memadai. Aisah berpendapat sebagai berikut:

"Pemegang pimpinan puncak haruslah orang yang memiliki kemampuan dan pengetahuan yang memadai. Tanpa pengetahuan yang memadai bagaimana ia end mengarahkan jalannya perusahaan, mencetuskan ide-ide dan inovasi baru dalam melakukan pengembangan dan

ekspansi perusahaan. Dan pastinya tidak setiap orang memiliki kemampuan dan pengetahuan yang cukup. Seorang eksekutif pastinya harus memiliki modalitas yang cukup dalam mengendalikan jalannya perusahaan. Saya kira wajar jika modal yang dia keluarkan misalnya dengan mengenyam pendidikan yang tinggi dan lebih baik patut mendapatkan imbal hasil yang lebih besar dari karyawan biasa dan yang mungkin hanya lulusan SMA.”

Dosen memberikan paparan mengenai pandangan ini. “Bukankah dalam era sekarang ini, masalah pendidikan merupakan masalah kesempatan, kemampuan, dan daya beli dari seseorang?” Mari kita renungkan, “Siapakah dan seberapa banyak mereka yang memiliki kesempatan untuk mengenyam pendidikan tinggi?” Masalah ini tentunya kembali pada masalah kekuasaan akan *capital*. Mari kita lihat sekeliling kita, setiap orang dalam ruangan ini, coba renungkan kembali, apa yang membawa kita sampai pada ruangan ini, menikmati segala fasilitas dan nikmatnya mereguk ilmu dalam jenjang ini. Andhika mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

“Kami yang memiliki kemampuan untuk membayar uang SPP dan biaya-biaya lainnya. Itu adalah syarat wajib, kecuali bagi beberapa orang yang pintar yang dapat menerima tunjangan beasiswa atau orang-orang yang mempunyai keinginan dan kemauan, dan mau mengusahakan serta berusaha keras untuk dapat menutup segala biaya.”

Ini artinya bahwa biaya atau modalitas setara lainnya yang dapat mensubstitusi biaya pendidikan adalah syarat yang harus ada. Dalam artian lain, bahwa tidak setiap orang memiliki kesempatan yang sama. Sehingga pengetahuan “spesifik” berkaitan dengan pengelolaan perusahaan (organisasi) yang harus dimiliki oleh seorang pemegang kekuasaan manajerial hanya dapat dimiliki oleh orang-orang tertentu yang memiliki kekuasaan atas modal (*capital*). Namun, berkaitan dengan tanggung jawab kerja adalah sebuah

kemelekatan atas pekerjaan yang diemban oleh seseorang, dan memiliki bobot yang tidak berbeda pada setiap individu. Kemudian, apa yang mendorong perbedaan substantial atas disparitas kompensasi yang tinggi ini? Apakah pada akhirnya “kekuasaan atas *capital*” yang akan membawa pada pembenaran kesenjangan atas kompensasi tersebut?

Berdasarkan dialog 1, signal doxa yang muncul dalam habitus secara umum, habitus menganggap bahwa persoalan perbedaan kompensasi yang tinggi merupakan suatu hal yang wajar dan seharusnya, dan muara perbedaan ini adalah bersumber dari kekuasaan atas “*capital*”. *Capital*, yang dalam pendidikan Bourdieu (1977) merupakan metafora modal dalam artian ekonomi, yang artinya adalah segala sesuatu yang dapat dilipatgandakan dalam rangka mendapatkan keuntungan, baik ekonomi, sosial, politik, atau budaya. Selanjutnya Pilliang (2006) menjelaskan bahwa Bourdieu membagi *capital* ke dalam 4 jenis, antara lain: modal ekonomi, seperti: uang, simpanan, atau asset lainnya; modal pendidikan, seperti strata pendidikan, gelar, atau penghargaan; modal pendidikan (*symbolic capital*), seperti: status, prestise, atau otoritas; dan modal budaya (koleksi atau objek).

Untuk mengkorfirmasi signal doxa dalam dialog 1, dimana aspek dialogisnya lebih berfokus pada wacana akademik, maka dalam **dialog 2**, pertanyaan akan lebih difokuskan pada aspek kesadaran dan pemahaman individual atas harapan dan orientasi diri. Pertanyaan 2 dilontarkan pada sesi tatap muka yang berbeda, dilakukan pada awal atau akhir perkuliahan. Pertanyaan yang dilontarkan oleh *observer* (dosen) adalah “Apa tujuan dan motivasi Anda memasuki jenjang perguruan tinggi dan memilih jurusan ini?” Tujuan dari pertanyaan ini adalah untuk melihat apakah terdapat benang merah atas pemahaman intelektualnya dengan tingkat kesadaran serta orientasi atas pemahaman yang dimilikinya.

Jawaban yang dilontarkan oleh beberapa mahasiswa 110endid senada. Beberapa

kutipan jawaban dari habitus disajikan sebagai berikut:

“Mencari pekerjaan sekarang ini penuh dengan kompetisi yang tinggi. Dengan menempuh kuliah, saya berharap dapat kesempatan yang lebih tinggi, jika dibandingkan dengan mereka yang hanya lulusan SMA atau SMK.” (Naufal)

“Saya sekarang sudah bekerja, dengan pekerjaan yang saya miliki, saya dapat sedikit membantu meringankan beban orang tua dalam meng-cover biaya kuliah. Saya berharap dengan kuliah, saya akan mendapat kesempatan dan posisi yang lebih baik. Dengan demikian saya akan mendapatkan benefit, posisi, dan tentunya bergaji yang lebih tinggi, dibandingkan jika saya hanya lulusan SMA.” (Effendi)

“Saya ingin meraih kesuksesan yang lebih tinggi. Dengan sekolah tinggi saya berharap mendapatkan posisi yang lebih baik di perusahaan, karena dengan sekolah di perguruan tinggi, kita akan mendapat ilmu pengetahuan yang lebih tinggi yang diperlukan sehingga kita dapat memperoleh posisi yang lebih tinggi pula. Dengan seperti itu maka kita akan mencapai kesuksesan yang kita inginkan.” (Abdurrahman)

“Akuntansi merupakan bidang yang sangat dibutuhkan oleh banyak perusahaan. Dengan skill yang kita miliki, maka kesempatan untuk mendapatkan pekerjaan juga lebih tinggi. Semakin tinggi strata pendidikan yang kita enyam, maka semakin tinggi kesempatan untuk meraih sukses, kita lebih memiliki kesempatan berkarir dalam jenjang lebih tinggi.” (Elena)

“Akuntansi merupakan bidang khusus yang tidak dapat kita dapatkan secara begitu saja. Kita perlu kuliah pada perguruan tinggi, D3 atau S1. Dengan kuliah kita akan mendapatkan pengetahuan ini, dan pengetahuan ini sangat dibutuhkan oleh perusahaan-perusahaan. Dengan pengetahuan khusus ini, maka kita akan

lebih mudah mendapatkan pekerjaan, terutama pada perusahaan-perusahaan yang lebih bonafit.” (Frida)

Berdasarkan jawaban-jawaban di atas, terdapat beberapa point yang dapat kita garis bawahi, antara lain: memperoleh pekerjaan yang lebih baik, meraih kesuksesan, posisi dan jabatan, bergaji tinggi, perguruan tinggi dan pengetahuan khusus, biaya kuliah, berkarir, perusahaan bonafit, memiliki daya saing yang lebih baik. Jika kita ambil simpulan, maka aspek kesadaran (*doxa*) serta orientasi individual adalah bahwa dengan mengenyam pendidikan tinggi dan tentunya dibarengi dengan kebutuhan akan biaya, mereka akan mendapatkan pengetahuan khusus – dalam hal ini adalah akuntansi – dimana pengetahuan dan *skill* ini sangat dibutuhkan oleh perusahaan, khususnya perusahaan yang bonafit, yang dapat mengantarkan mereka pada jenjang karir dan jabatan sehingga dapat bergaji tinggi dan memperoleh kesuksesan, dibandingkan jika hanya lulusan sekolah menengah (SMA atau SMK).

Berdasarkan simpulan tersebut, kita dapat mengambil benang merah antara 2 dialog di atas. Beberapa aspek sudah kita bahas dalam penyajian data dialog 1, yaitu mengenai biaya (*modal*) dan kesempatan untuk menempuh strata pendidikan yang lebih tinggi. Aspek lain yang dapat kita kupas adalah penguasaan atas pengetahuan khusus (*akuntansi*) dapat membawa habitus pada jabatan yang lebih tinggi dibandingkan dengan hanya sekolah menengah. Berdasarkan ungkapan habitus, jenjang pendidikan membawa pada sebuah *gap*, baik pengetahuan, kesempatan, dan atau prestise. *Gap* ini tentunya merupakan salah satu faktor pula yang menentukan perbedaan dan kesenjangan.

Dalam tradisi pengetahuan modern yang industrialis kapitalis, sekolah merupakan salah satu alat untuk menyokong industri (Mulawarman 2006 dan Molisa 2016). Spesialisasi dan kompetensi diciptakan dalam menopang kebutuhan ini. Sesuai dengan sandaran filosofis yang membangun pola



pengetahuan barat (modern) dan berorientasi industrial, cara pandang yang membentuknya adalah fragmentasi Cartesian Newtonian (Alfia 2015; Heriyanto 2003). Pengetahuan dibentuk dan dibagi berdasarkan spesialisasi-spesialisasi (Henry 2002).

Salah satu ciri utama pengetahuan yang terfragmentasi adalah terjadinya reifikasi ilmu, di mana pengetahuan yang dibentuk ditransformasikan dan dipaksakan hanya pada aspek tatanan material (Heriyanto 2003). Seperti halnya akuntansi, perspektif yang dibangun dalam akuntansi hanya berorientasi pada aspek material dalam tatanan nominasi uang, seperti kalkulasi asset, biaya (beban), laba/rugi. Pembatasan yang rigid ini membawa pengetahuan akuntansi berada pada dasar-dasar asumsi akademis tertentu yang hanya dapat dipahami oleh dirinya sendiri (Riduwan 2008). Akuntansi pada akhirnya berjarak pada realitas yang seharusnya (Hines 1988 dan 1989; Dillard 1991; Machintos *et al* 2000; Mattessich 2003; dan Riduwan 2008). Riduwan (2008) menyatakan bahwa akuntansi merupakan diskursus akademis padahal memiliki kebutuhan praktis dalam dinamika ruang sosial. Sehingga hanya mereka yang memiliki kesempatan akademis saja yang dapat memahami akuntansi.

Kekuasaan atas kapital yang dimiliki seseorang untuk dapat menempuh pendidikan tinggi, kesempatan karir untuk mendapatkan gaji tinggi juga didapat dari kuasa reifikasi ilmu. Berdasarkan data di atas (dialog 1 dan 2), *Freirian coding* dalam memetakan (menganalisis) doxa habitus adalah *the beauty of capital domination* (dominasi kapital) dan *the power of knowledge reification* (reifikasi pengetahuan). Kedua *coding* ini merupakan aspek doxa yang dapat membawa pada terjadinya masalah kesenjangan personalia. Berikut adalah diskursus analisis data berdasarkan *Freirean Coding*.

#### *The beauty of capital domination*

Dominasi kapital merupakan isu penting dalam masyarakat pasca industrial. Sebagaimana diskursus Bourdieu bahwa setiap *field* (arena) dalam ruang sosial (masyarakat) dikonstruksi atas dasar dominasi kapital. Pernyataan mahasiswa yang menyatakan bahwa “wajar jika terdapat perbedaan gaji yang tinggi (senjang) antara *top management*

dengan karyawan rendahan (biasa)” menunjukkan secara jelas bagaimana aspek dominasi kapital – dalam segala bentuknya – merupakan satu hal yang sudah semestinya terjadi. Masalah kesenjangan personalia sebagaimana topik artikel ini pada akhirnya merupakan kemustian yang harus terjadi.

Struktur (stratifikasi) dalam sosial (perusahaan) merupakan jaringan atau konfigurasi hubungan-hubungan objektif antar posisi. Wanlie (2012) menyatakan bahwa jaringan relasi objektif pada tatanan stratifikasi struktur dapat mendorong dan mengorientasikan strategi yang digunakan habitus pada berbagai posisi dalam perjuangan mempertahankan atau mengambil posisi mereka. Kekuatan dan bentuk strategi tergantung pada posisi tiap habitus dalam relasi kekuasaan, seperti atasan – bawahan atau kelas terdidik dan kurang atau tidak terdidik. Posisi ditentukan oleh kepemilikan berbagai kapital yang saling berhadapan dan akumulasi kapital untuk mempertahankan dominasi dalam arena (*field*) tertentu.

Dalam relasi sosial, dunia perusahaan merupakan dunia bursa kerja bagi para pelajar, dimana dalam *field* pendidikan (akuntansi), arena sekolah pendidikan tinggi merupakan sarana reproduksi budaya (industrial dan kapitalis) (Freire 2000), sehingga *field* ini merupakan cerminan dari sistem stratifikasi yang mereproduksi kondisi dominasi ini dalam masyarakat (Bourdieu 1979). Hal ini seperti relasi atasan bawahan yang direfleksikan pada relasi kalangan terdidik dan kurang atau tidak terdidik. Kuasa kapital yang dimiliki oleh masing-masing merupakan aspek signifikan yang semestinya dan berterima umum. Pada akhirnya pendidikan tinggi adalah sebagai arena untuk mempertahankan *status quo* kekuasaan, dan bukan sebagai agen-agen perubahan. Maka di sinilah kesenjangan akan selalu terjadi.

Hal ini sebagaimana disampaikan pada proses dialogis di atas. Dalam dialog 1, ada relasi kuasa atasan – bawahan dimana jabatan eksekutif dianggap memiliki tanggung jawab yang lebih, karena kuasa pengetahuan yang dimilikinya. Dalam

relasi struktur atasan bawahan, jelas mengindikasikan adanya relasi kuasa atasan terhadap bawahan. Yang dimaksud kuasa di sini adalah kuasa atas kepemilikan kapital dalam segala bentuknya, seperti pengetahuan, pendidikan, status, gelar, dan atau ekonomi. Relasi kuasa atasan – bawahan ini kemudian menjadi sesuatu yang harus dimiliki dan diidealkan oleh seseorang. Kekuasaan dalam stratifikasi struktur ini berarti kesempatan untuk mendapatkan timbal balik kapital yang tinggi pula – yang dalam dialog 2 jelas dikatakan bahwa, jabatan merupakan prestise, status sosial, simbol kesuksesan – termasuk kemakmuran finansial yang harus dicapai dan dimiliki oleh seseorang. Dalam hal ini Bourdieu dan Wacquant (1992) menyatakan sebagai berikut:

*“....By field of power, I mean the relations of force that obtain between the social positions which guarantee their occupants a quantum of social force, or of capital, such that they are able to enter into the struggles over the monopoly of power, of which struggles over definition of the legitimate form of power are a crucial dimension.”*

Dalam *field* pendidikan akuntansi, sekolah tinggi merupakan salah satu cara (strategi) yang digunakan untuk mendapatkan posisi atau jabatan tertentu.

Istilah *the beauty of capital domination* digunakan dengan meminjam pengistilahan dari Kamayanti *et all.* (2011) yang menyatakan tentang keberadaan pendidikan akuntansi yang berada pada hegemoni kekuasaan sistem besar kapitalisme dan neo-liberalisme, dan hegemoni yang ada dirasa sebagai *the beauty*. Sebuah sistem hegemoni lahir dari proses kolonial yang dipertahankan oleh sistem pendidikan yang maskulin melalui reproduksi buku-buku text serta pola pendidikan *banking system* dan *oppressive* (Freire 2000) sebagaimana dijelaskan dalam studi Kamayanti *et all.* (2011). Dengan demikian maka keberadaan pendidikan ini menjadi sebuah keindahan dalam sistem sosial masyarakat karena pemegang lisensi *status quo* itu bernama “pendidikan”.

Pada era dan pasca industrial, keberadaan material merupakan sesuatu yang diagungkan meninggalkan aspek-aspek spiritual

sebagaimana visi cara pandang yang membentuknya. Kapital – terutama dalam padanan ekonomi merupakan sesuatu yang niscaya, sehingga Bourdieu pun mengambil padanan ini untuk merujuk pada kemampuan seseorang untuk meraih (mendapatkan) sesuatu. Dimana “kemampuan” ini menunjuk pada daya beli dan kekuasaan dengan nilai pertukaran “uang”. Materialisme dalam era ini mewujud dalam bentuk uang dengan transformasi nilai yang abstrak. Bahkan Simmel (1990) menyatakan bahwa hubungan interseksi dalam sosial masyarakat era ini bertuhankan uang. Pada akhirnya, kemampuan yang melekat pada diri seseorang akan (harus) berasosiasi dengan kepemilikannya (penguasaan) pada kapital – uang, dari pada integritas yang melekat pada diri seseorang (lihat Simmel 1990). Pada situasi ini, kapital dapat menihilkan keberadaan individual seseorang, yang artinya bahwa semua manusia sama di hadapan kekuasaan kapital ini dan pada akhirnya memfragmentasi masyarakat sosial – dalam kelas-kelas sosial. Kepemilikan kapital oleh seseorang menjadi sesuatu yang indah, keindahan, atau sebagai nilai kesuksesan.

Fragmentasi yang terjadi dalam masyarakat karena dominasi kapital yang dimiliki oleh seseorang pada akhirnya menjadi sesuatu yang dibenarkan dan yang seharusnya, bahkan adalah sesuatu yang diidealkan. Sejalan dengan hal ini, maka kesenjangan dan ketidakadilan akan terjadi, karena seseorang tidak lagi dinilai berdasarkan nilai kemanusiaannya, namun dengan penguasaannya akan kapital. Semakin rendah kepemilikannya atas kapital maka semakin rendah keberadaannya. Kesadaran inilah yang terbentuk dalam masyarakat yang terefleksi pula dalam cara pandang anak didik, yang tanpa disadari akan menyebabkan keberadaan kesenjangan dan mempertahankan *status quo* dominasi kapital.

#### **The Power of Knowledge Reification.**

Studi Kamayanti *et all.* (2011) menunjukkan bahwa *status quo* colonial dikukuhkan oleh sistem pendidikan yang

maskulin, yaitu melalui reproduksi buku-buku text dan melalui pola pendidikan *banking system* sebagaimana diutarakan oleh Freire (2000). Dominasi kapital yang merujuk pada aspek pendidik ini, pada akhirnya membawa pada proses reifikasi dan reifikasi itu sendiri. Sebagaimana proses dialogis empiris dalam penelitian ini, mendapatkan pengetahuan khusus seperti akuntansi merupakan batu pijakan untuk meraih kesuksesan, sebagaimana dimaksudkan di atas. Doxa “kekhususan pengetahuan” ini merupakan paradigma pendidikan modern, kebutuhan akan adanya spesialisasi dan kompetensi intelektual (Henry 2000). Kekhususan pengetahuan ini merupakan orientasi yang dibutuhkan habitus untuk meraih sesuatu – kesuksesan. Pengetahuan menjadi sesuatu yang eksklusif dan hanya didapat melalui proses edukasi pada jenjang pendidikan tinggi. Sebagaimana diskusi pada *coding* hegemoni kapital di atas, bahwa proses ini hanya akan didapat dari kekuasaan atas kapital, berkaitan dengan daya beli kita akan pendidikan serta kesempatan yang tidak dapat dimiliki oleh sembarang orang.

Simmel (1990) mengatakan bahwa manusia menciptakan nilai dengan menghasilkan sesuatu (produk) dengan memisahkan dirinya dengan apa yang dikreasinya lalu berusaha untuk mengatasi jarak antara dirinya dan karya itu – termasuk pengetahuan. Makin langkah (berjarak) suatu karya (sulit diperoleh) maka makin tinggi nilainya, semakin tidak berjarak maka semakin rendah nilainya, dan fungsi kapital – uang adalah membuat jarak sekaligus mengatasinya. Kekhususan yang melekat pada pengetahuan ini kemudian menjadikannya berjarak dan hanya dapat diatasi oleh aspek kapital.

Kesadaran yang demikian menunjukkan bagaimana kekuatan reifikasi pengetahuan merupakan bagian dari hegemoni kapital yang harus dimiliki oleh seseorang untuk menempati suatu posisi tertentu. Jika masuk ke dalam diskursus Simmel (1990), maka penguasaan kapital adalah bagian dari proses reifikasi pula, yang menempatkan uang sebagai agen reifikasi dalam masyarakat. Mengapa demikian? Cara pandang pengetahuan modern pada era ini yang menggunakan sudut pandang *single vision* membawanya pada sifat pengetahuan yang

reduktif dan fragmentatif. Pengetahuan berada pada hegemoni materialisme sebagaimana ideologi yang dimilikinya. Sehingga cara pandang dan pengetahuan yang demikian jelas akan terefleksikan pada kehidupan sosial masyarakat, di mana uang merupakan 114endid dan alat dari materialisme. Sistem dan stratifikasi sosial yang terbentuk merupakan hasil reproduksi dari dunia ideal yang diciptakannya, kekuasaan materialisme.

Spesifikasi reduktif ini menyebabkan pengetahuan berjarak dari manusia yang mengkreasi (menterjemahkan) suatu pengetahuan. Konsep idealitas “material” ini membawa pengetahuan memiliki logika dan mekanisme tersendiri. Jarak pengetahuan dari manusia yang diciptakan oleh idealitas tersebut membawa pengetahuan terlepas dari keutuhan realitas (materi-spirit) yang pada akhirnya sulit dipahami karena keberadaannya hanya dapat dibuktikan pada dirinya sendiri (Heriyanto 2007 dan Riduwan 2008). Kekhususan dan spesifikasi inilah yang membawa pengetahuan memiliki nilai jual. Kembali pada diskursus Simmel (1990) bahwa manusia menciptakan jarak atas apa yang dikreasinya dan mengatasi jarak itu dengan kekuatan kapital. Maka di sinilah kekuasaan reifikasi pengetahuan akan menguasai kesadaran manusia sebagai sesuatu yang diidealkan karena eksklusifitas (jarak) yang dimilikinya. Maka siapa yang memiliki dan menguasai eksklusifitas ini sebagai bentuk kekuasaan atas kapital (pendidikan, gelar) memiliki hak untuk melakukan penguasaan (memiliki) jabatan tertentu yang lebih tinggi dibandingkan dengan kelas masyarakat yang tidak memiliki kesempatan (nir kapital). Berdasarkan analisis ini, maka adalah sebuah kewajaran kesenjangan (personalia) dapat terjadi.

Jika diuraikan tentang konsep reifikasi ini dalam *field* (arena) pendidikan akuntansi, kita dapat meminjam studi yang dilakukan oleh Riduwan (2008) yang menganalisis tentang realitas referensial laba. Dalam studinya ditemukan bahwa akuntansi seharusnya merupakan kajian bisnis yang merefleksikan realitas bisnis (praktis),

namun pada nyatanya, akuntansi merupakan ilmu yang hanya dapat dipahami oleh diskursus akademik. Akuntansi memiliki dasar-dasar asumsi tertentu, dimana akuntansi memfragmentasikan realitas dengan menggunakan logika objektif material uang "keuangan". Akuntansi sebagai bahasa bisnis – dalam tatanan habitus praktis – ternyata hanya merefleksikan dunia habitus idealistik (akademik), akuntansi memiliki potensi pada terjadinya hegemoni. Hegemoni ini menciptakan sekat dalam ruang sosial, karena pemilik kuasa akademik yang dimiliki habitus idealistik akan mendominasi habitus non idealistik (praktis). Lebih lanjut Riduwan (2008) menjelaskan pandangan Karl Marx yang mengatakan bahwa hegemoni dari kelompok yang memiliki kuasa akan membentuk pandangan umum tentang dunia yang hanya menghasilkan kesadaran semu.

Kesenjangan personalia, keberadaan ini juga terefleksi pada keberadaan konsep yang membangun akuntansi, sebagai pengetahuan yang ditempatkan dalam kepentingan ekonomi semata dibandingkan estetika. Personalia merujuk pada keberadaan manusia sebagai sumber daya (pelaku) dalam lingkup bisnis. Keberadaan ini oleh akuntansi diproyeksikan dalam tatanan akun biaya, sebagai sediaan (produksi) atau beban, sebagai beban gaji/upah dan atau Harga Pokok Persediaan (HPP). Berdasarkan konsepsi *bottom line*, keberadaan manusia merupakan aspek akun yang harus ditekan nilainya sehingga dapat diperoleh angka laba yang tinggi – akumulasi kapital. (Martabat) manusia dinilai atas dasar uang dalam konsepsi *bottom line*, yang jelas menunjukkan bagaimana struktur hegemoni kapital dalam tatanan struktur sosial masyarakat terefleksi di sana. Berdasarkan analisis ini, jelas bahwa masalah reifikasi merupakan persoalan kekuasaan dan hegemoni kapital yang jelas akan menimbulkan kesenjangan dalam berbagai tingkatannya. Hal ini sebagaimana studi yang dilakukan oleh Molisa (2013) yang menyatakan bahwa akuntansi dan pendidikan akuntansi membawa kesenjangan pada berbagai lini isu – tidak hanya personalia.

#### Mental Accounting dan Paradigma Sukses.

Bahasan ini merupakan sintesa hasil pembahasan penelitian, yaitu *the beauty of capital domination* dan *the power of knowledge reification*. Dua temuan (doxa) dalam penelitian ini menggarisbawahi bahwa pemaparan sistem (kapitalistik) dalam perpanjangan tangan kurikulum pendidikan akuntansi merupakan bagian bentukan dari *mental accounting* (Rospitadewi dan Efferin 2018). Bagaimana *mental accounting* dapat terjadi? sebagaimana dinyatakan Liu (2017) bahwa akuntansi merupakan bagian pengetahuan sebagaimana matematika atau *science* lainnya, yang membantu manusia untuk memahami dunia. Lebih lanjut lagi, sebagai pengetahuan dalam pendidikan bisnis yaitu bagaimana akuntansi melakukan tabulasi aktivitas moneterial manusia.

Dalam konsepsi Bourdieu (1977), bahwa doxa habitus mahasiswa akuntansi dalam hasil penelitian ini merefleksikan bagaimana cara (logika) akuntansi bekerja. Hal inilah yang dimaksud dengan *mental accounting*, adalah proses kognitif cara kerja akuntansi, yang secara menitik yaitu bagaimana proses akuntansi dalam mengakumulasi laba. Laba merupakan tujuan dalam proses akuntansi, sebagai bentuk (alat teknikal) bisnis yang berupaya mengejar dan mengakumulasi kekayaan.

Laba merupakan jalan bisnis dalam mengakumulasi kapital. Keberhasilan bisnis dalam mengakumulasi kapital merupakan capaian "ideal" dan merupakan ukuran kesuksesan dalam bisnis. Dengan kata lain kemajuan dan akumulasi kapital, melalui kaidah dalam akuntansi penandingan *cost* dan *benefit* merupakan keindahan yang mesti dituju. *The beauty of capital domination* sebagai doxa habitus menunjukkan keberadaan *mental accounting*. Sebagai ukuran kesuksesan, maka dominasi kapital merupakan *the beauty cage* dalam pendidikan akuntansi.

Merujuk pada pendapat Liu (2017), bahwa keberadaan *mental accounting* menjadi sesuatu yang mapan, karena pengetahuan tentang akuntansi pada dasarnya menjelaskan pemahaman manusia tentang dunia itu sendiri. Artinya bangunan

sistem dan supra sistem pembentuk pengetahuan akuntansi merupakan bagian yang memiliki interkoneksi. Sistem pendidikan yang direpresentasi dalam kurikulum merupakan bagian bentukan dari kepanjangan tangan supra sistem yang ada di atasnya. Sebagaimana pernyataan Mulawarman (2008 dan 2010) masalah kepentingan dan dominasi merupakan komponen penting yang pada akhirnya membentuk *mental accounting*.

## 5. PENUTUP

### Kesimpulan dan Saran

Berdasarkan analisis di atas ditemukan terdapat dua doxa etik habitus mahasiswa akuntansi berkaitan dengan kesenjangan personalia, yaitu: *the beauty of capital domination* dan *the power of knowledge reification*. Berdasarkan dua coding yang mendeskripsikan doxa mahasiswa ini, maka metodologi dan materi-materi penunjang dalam pendidikan akuntansi, utamanya etika bisnis perlu disandarkan pada kedua isu ini sebagai point yang perlu didekonstruksi. *Stand point* yang memberikan landasan bahwa kedua isu ini merupakan masalah akar yang harus dibalik dan menjadi bagian dari dialektika kelas.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ainsworth, P. 2001. Changes in Accounting Curricula: Discussion and Design. *Accounting Education* 10.
- Alfia, Y.D., I. Triyuwono, A.D. Mulawarman. 2015. Formulasi Tujuan Akuntansi Syariah dalam Perspektif Filsafat Hikamah. *Tesis tidak Dipublikasikan*. Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya. Malang
- Alfia, Y.D; I. Triyuwono, A.D Mulawarman. 2016. Visi Antroposik: Membangun Kerangka Prinsip Teoretis Akuntansi. *Proceeding The Third International Conference ThuSI Jakarta*.
- Armenic, J. dan R. Craig. 2004. Reform of Accounting Education in The Post Enron Era: Moving Accounting "Out of The Shadows". *ABACUS* 40(3): 342-378
- Bonawitz, M. F. 2002. Analysis and Comparison of The Moral Development of Students Required to Graduate with An Ethics Course. *Unpublished Ph.D. Dissertation*. Florida International University. Miami, Florida.
- Bourdieu, P. 1977. Outline of A Theory of Practice. Cambridge University Press.
- Capra, Fritjof. 2004. The Hidden Connections: Strategi Sistemik Melawan Kapitalisme Baru. Jalasutra. Yogyakarta.
- Chu, S. dan H. Man. 2012. History of Accounting Education. *Journal of Higher Education Theory and Practice* 12(1): 119-128.
- Chwastiak, M dan J. J. Young. 2003. Silences in Annual Report. *Critical Perspective on Accounting* 14: 533-552.
- Chwastiak, M. 1998. Star Wars at The Bottom Line: The Accounting Forum For Defense Contractors. *Accounting, Organizations, and Society* 23(4): 343-360.
- Chwastiak, Michele. 1999. Accounting and The Cold War: The Transformation of Waste into Riches. *Critical Perspective of Accounting* 10: 747-771.
- Dewi, L.G.K. dan A.A. Dewi. 2018. Money and Unethical Behaviour of Accounting Students. *Journal of Accounting and Business Education* 2(2): 221-237.
- Dillard, J. 1991. Accounting as a Critical Social Science. *Accounting, Auditing, and Accountability Journal* 4: 8-28.
- Dosch, R. J. dan J. R. Wambsganss. 2006. The Blame Game: Accounting Education is Not Alone. *Journal of Education for Business* 81(5): 250-254.
- Efferin, S. 2015. Akuntansi, Spiritualitas, dan Kearifan Lokal: Beberapa Agenda Penelitian Kritis. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma* 6(3): 466-480. <http://dx.doi.org/10.18202/jamal.2015.12.6037>
- Freire, Paulo. 2000. Pedagogy of The Oppressed. The Continuum International Publishing Group Inc. New York.

- Heriyanto, Husein. 2003. Paradigma Holistik: Dialog Filsafat, Sains, dan Kehidupan Menurut Sadra dan Whitehead. Penerbit Teraju. Bandung.
- Hines, R. 1988. Financial Accounting: In Communicating Reality, We Construct Reality. *Accounting Organization and Society* 13(3): 251-261.
- Irianto, Gugus. 2003. Skandal Korporasi dan Akuntan. *Lintasan Ekonomi* XX(2): 104-122.
- Kamayanti, A dan A.D. Mulawarman. 2009. Implementation Refined Hyperview of Learning (rHOL) on Management Accounting Learning Process (An Extended Ethnographic Study). *The Indonesian Journal of Accounting Research* 12(3): 255-270.
- Kamayanti, A.; I. Triyuwono; G. Irianto; A.D. Mulawarman. 2011. Exploring The Presence of Beauty Cage in Accounting Education: An Evidence from Indonesia. *Proceeding Simposium Nasional Akuntansi XIV Aceh 2011*. Universitas Syiah Kuala Banda Aceh.
- Liu, T.-K. 2017. Cashlet Theory: Discovering the Nature of Accounting. *Open Journal of Accounting* 6: 11-32.
- Maunder, K. dan R. Burrit. 1991. Accounting and The Ecological Crises. *Accounting Auditing, & Accountability Journal* 4(10): 481-531.
- Merino, B. D. 2006. Financial Scandals: Another Clarion Call for Education Reform - A Historical Perspective. *Accounting Education* 21(4): 363-381.
- Molisa, P. B. M. 2014. Accounting for Apocalypse: Re-Thinking Social Accounting Theory and Practice for Our Time of Social Crises and Ecological Collapse. *Unpublished Ph.D. Thesis*. Victoria University of Wellington.
- Morgan, G. 1988. Accounting as Reality Construction: Towards A New Epistemology for Accounting Practice. *Accounting, Organization, and Society* 13(5): 477-485.
- Mulawarman, A. D. dan U. Ludigdo. 2010. Metamorfosis Kesadaran Etis Holistik Mahasiswa Akuntansi Implementasi Pembelajaran Etika Bisnis dan Profesi Berbasis Integrasi IESQ. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma* 1(3): 421-436.
- Mulawarman, A. D. 2008. Pendidikan Akuntansi Berbasis Cinta: Lepas dari Hegemoni Korporasi menuju Pendidikan yang Memberdayakan dan Konsepsi Pembelajaran yang Melampaui. *Ekuitas* 12(2): 142-158.
- Mulawarman, A. D. 2011. Akuntansi Syariah: Teori, Konsep, dan Laporan Keuangan. E-Publishing Company. Jakarta.
- Nasr, Seyyed Hossein. 1989. Knowledge and The Sacred. State University of New York Press. New York.
- Nelson, I. 1995. What's New About Accounting Education Change? A Historical Perspective on The Change Movement. *Accounting Horizons* 9(4): 62-75.
- Patrizi, N., V. Niccolucci, R. M. Pulselli, E. Neri, dan S. Bastianoni. 2018. The Ecological Footprint Accounting of Products: When Larger Is Not Worse. *Resources* 7(65): 1-13.
- Pikkety, T. 2014. Capital in The Twenty First Century. Belknap Press. New York.
- Previts, G. J. dan B.D. Merino. 1998. A History of Accountancy in The United States: The Cultural Significance of Accounting. Ohio State University. Columbus, Ohio.
- Rospitadewi, E. dan S. Efferin. 2018. Mental Accounting dan Ilusi Kebahagiaan: Memahami Pikiran dan Implikasinya bagi Akuntansi. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma* 8(1): 18-34.
- Sari, L. P. 2012. Pengaruh Muatan Etika Dalam Pendidikan Akuntansi Terhadap Persepsi Etika Mahasiswa. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma* 3(3): 380-392.
- Siegel, G., J.E. Sorensen, T. Klammer; S.B., dan Richtermeyer. 2010. The Ongoing Preparation Gap in Accounting Education: A Call to Action. *Management Accounting Quarterly* 11(3): 41-52.
- Stiglitz, J. E. 2006. Dekade Kesekarahan: Era 90'an dan Awal Mula Petaka Ekonomi

Dunia. Terjemahan. Penerbit Margin Kiri.  
Tangerang.

Tonge, A.; L. Greer; A. Lawton. 2003. The Enron Story: You Can Fool Some of The People Some of The Time... *Business Ethics: A European Review* 12(1): 4-22. Blackwell Publishing Ltd.

Triyuwono, I. 2015. Filosofi Tauhid: Mendekonstruksi Pendidikan Akuntansi Syariah yang Sekuler. Workshop Nasional Kurikulum Akuntansi Syariah, UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta.

Tuanakotta, T. M. 2007. Setengah Abad Profesi Akuntansi. Edisi Pertama. Penerbit Salemba Empat. Jakarta.

Tuanakotta, T. M. 2012. Audit Kontemporer. Penerbit Salemba Empat. Jakarta.